

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agresivitas pajak sebagai jalan keluar bagi perusahaan untuk dapat membayar pajak seminim mungkin. Agresivitas pajak merupakan tindakan memanipulasi pendapatan kena pajak yang dilakukan melalui cara perencanaan pajak baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) Frank, et al (2008). Agresivitas pajak dengan menggunakan cara legal (*tax avoidance*) bertujuan untuk memanfaatkan celah dari kelemahan di dalam peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang di dalam perusahaan. Cara legal (*tax avoidance*) merupakan cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Tindakan pajak yang agresif disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, dimana perusahaan ingin beban pajak penghasilannya lebih kecil karena dapat mengurangi laba bersih dengan adanya beban pajak tersebut. Kondisi tersebut banyak menyebabkan perusahaan berusaha agar mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Sedangkan penerimaan pajak bagi pemerintah merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara.

Terjadinya agresivitas pajak di dalam perusahaan tak lepas dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, adanya kepemilikan manajerial dan komisaris independen di dalam perusahaan menjadi tolak ukur tingkat agresivitas pajak yang terjadi di dalam perusahaan. Peran penting kepemilikan manajerial dan komisaris independen dapat menghasilkan transparansi dan keandalan di dalam penyajian laporan keuangan yang akan terlihat bagaimana return yang akan diterima oleh

para investor. Agresivitas pajak juga dapat dilakukan menggunakan cara manajemen laba. Untuk dapat menghasilkan biaya pajak yang lebih rendah biasanya pihak manajemen melakukan manajemen laba di dalam laporan keuangan dengan cara mengintervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi.

Fenomena kasus mengenai agresivitas pajak pada subsektor *Property* dan *Real Estate* di Indonesia. Adanya potensi penerimaan pajak dari subsektor *property* dan *real estate*, Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkannya transaksi yang sebenarnya jual-beli tanah dan bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pajak yang dibayarkan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan transaksi sebenarnya atau rill. Pada Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima oleh penjual (*developer* dan pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah dan bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Modus yang paling umum adalah menurunkan nilai jual unit properti di akte jual beli agar perusahaan properti dan konsumen membayar pajak lebih rendah dari seharusnya. “Namun cara seperti ini terbilang klasik, banyak cara lainnya,” kata seorang pemeriksa pajak pekan lalu kepada KONTAN (11/7) (<http://nasional.kontan.co.id>).

Dapat disimpulkan dari fenomena kasus tersebut bahwa adanya indikasi *potential loss* yang mungkin dilakukan pada kepemilikan manajerial maupun komisaris independen untuk melakukan manajemen laba di dalam tindakan agresivitas pajak yang berdampak pada perusahaan itu sendiri.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari Shelly (2017) yang berjudul pengaruh manajemen laba, *corporate governance*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan *property* dan *real estate* memberikan hasil kesimpulan secara parsial manajemen laba, kepemilikan

institusional, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun kepemilikan manajerial, frekuensi pertemuan komite, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) dengan judul pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur memberikan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alfred, dkk (2014) menunjukkan hasil pada manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dari 3 penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, terdapat beberapa hasil variabel yang berbeda, pada penelitian Novitasari Shelly memberikan hasil manajemen laba dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada penelitian Tiaras dan wijaya menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, begitu pula dengan penelitian Alfred yang menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya dan telah memberikan hasil yang berbeda mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya agresivitas pajak maka penulis ingin melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor tersebut dengan menggunakan objek penelitian pada perusahaan property dan real estate yang listing di BEI periode 2013-2016. Alasan pemilihan objek pada perusahaan tersebut dikarenakan dengan peningkatan permintaan terhadap property dan real estate di Indonesia diharapkan dapat memberikan peningkatan laba yang tinggi sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya, dan dari faktor ini juga yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2016)”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan berpengaruh pada agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris independen di dalam perusahaan akan berpengaruh pada agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan?
3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan?
4. Apakah kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan manajemen laba berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan berpengaruh pada agresivitas pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen di dalam perusahaan akan berpengaruh pada agresivitas pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan manajemen laba berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memahami *corporate governance* serta mencegah praktek manajemen laba yang dapat mempengaruhi pendapatan negara, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.

2. Bagi Regulator

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana risiko agresivitas pajak perusahaan lebih tinggi.

3. Bagi Investor

Sebagai alat untuk memperdalam ilmu akuntansi keuangan, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sejauh mana *coeporate governance* dan manajemen laba perusahaan itu berpengaruh terhadap agresivitas pajak sehingga dapat menjadi acuan untuk mendorong perusahaan agar menyajikan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar atau eksternal.